BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuanagan (OJK), dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terbagi atas 2 variabel eksogen dan 2 variabel endogen. Variabel eksogen pertama dalam penelitian ini adalah *financial inclusion* (FI) yang terdiri dari dua indikator yaitu indikator keuangan inklusif perbankan konvenional dan indikator keuangan inklusif perbankan syariah Indonesia. Variabel eksogen kedua adalah Pembiayaan Perbankan Syariah (PPS), pada variabel ini terdapat dua indikator yaitu pembiayaan modal kerja sektor UMKM dan pembiayaan investasi sektor UMKM. Untuk variabel endogen terdiri dari perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Berdasarkan data yang diperoleh dari 33 provinsi di Indonesia periode 2015 sampai 2018 dengan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 132 sampel yang kemudian diolah menggunakan SmartPLS 3.2.8, diperoleh statistik deskriptif dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev
FI (X1)	X1.1	0,56	0,36	0,84	0,10
	X1.2	0,30	0,15	0,62	0,10
PPS (X2)	X2.1	3,03	0,01	22,20	4,99
	X2.2	3,03	0,03	37,13	5,48
UMKM (Y)	Y.1	2,62	0,31	15,19	3,77
	Y.2	3,03	0,01	20,47	4,51
PE (Z)	Z.1	3,03	0,23	16,58	4,19
	Z.2	3,09	0,01	19,78	4,53

Sumber: Output olah data SmartPLS 3.2.8

Pada tabel 4.1 dapat dilihat terdapat nilai maximum yang menunjukkan nilai tertinggi dari setiap variabel, nilai minimum yang menunjukkan nilai terendah dari setiap variabel, nilai mean yang menunjukkan nilai rata-rata dari setiap variabel, serta standar deviasi yang menunjukkan seberapa besar perbedaan nilai sampel terhadap rata-ratanya.

Berdasarkan pada data variabel penelitian yang telah dianalisis menggunakan SmartPLS 3.2.8. Untuk variabel *financial inclusion* (X1) diketahui bahwa indikator *index financial inclusion* konvensional (X1.1) terendah sebesar 0,36 terjadi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,84 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015. Selain itu diperoleh juga nilai mean sebesar 0,56. Sementara standar deviasinya adalah sebesar 0,10. Sedangkan untuk indikator *index financial inclusion* syariah (X1.2) terendah sebesar 0,15 terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 - 2018, untuk nilai tertinggi sebesar

0,60 masih di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018, Dan diperoleh juga nilai mean sebesar 0,30. Sementara standar deviasinya adalah sebesar 0,12.

Sementara pada variabel pembiayaan perbankan syariah (X2), untuk indikator pembiayaan modal kerja (X2.1). Rasio pembiayaan modal kerja UMKM terhadap total pembiayaan modal kerja nasional terendah adalah sebesar 0,01 terjadi di provinsi maluku pada tahun 2017-2018, sedangkan rasio tertinggi sebesar 22,20 terjadi di provinsi DKI Jakarta di tahun 2018. Mean variabel ini sebesar 3,03 dan standar deviasinya sebesar 4,99. Sedangkan pembiayaan investasi (X2.2), rasio pembiayaan investasi terhadap total pembiayaan investasi nasional terendah adalah sebesar 0,03 terjadi di provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat pada tahun 2018, sedangkan rasio tertinggi sebesar 37,13 terjadi di provinsi DKI Jakarta di tahun 2018.

Pada variabel perkembangan UMKM (Y), rasio tenaga kerja sektor UMKM daerah terhadap total tenaga kerja Nasional (Y.1) terendah sebesar 0,31 terjadi di provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2018, sedangkan ratio tertinggi sebesar 15,19 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Kemudian diperoleh rasio mean sebesar 2,62, sementara standar deviasinya diperoleh sebesar 3,77. Sedangkan rasio Ekspor Non Migas daerah terhadap total Ekspor Nasional (Y.2) terendah adalah sebesar 0,01 terjadi di provinsi Gorontalo pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan rasio tertinggi sebesar 20,47 terjadi di provinsi Jawa Barat di tahun 2016.

Sementara pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (Z), rasio total PDRB Provinsi terhadap total PDRB Nasional (Z.1) dengan rasio terendah sebesar

0,23 terjadi di provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 sampai dengan 2016, rasio tertinggi sebesar 16,58 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Rasio mean indikator ini sebesar 3,03 dan standar deviasinya sebesar 4,19. Sedangkan untuk rasio total ekspor daerah terhadap total ekspor nasional (Z.2) dengan total rasio terendah adalah sebesar 0,01 terjadi di Provinsi Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat. Untuk rasio terendah sebesar 19,78 terjadi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, kemudian diperoleh rasio mean indikator ini sebesar 3,09 dan standar deviasinya sebesar 4,53

B. Gambaran Perkembangan Objek Penelitian

Sebelum dilakukan uji analisis, peneliti mencoba untuk memberikan gambaran umum perkembangan dari objek penelitian.

1. Perkembangan *Financial Inclusion* Indonesia

Dalam perkembangannya, upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan saja, akan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya seperti perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan.

Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalisasi program kerja yang telah disepakati bersama. Program tersebut antara lain program Laku Pandai, laku pandai merupakan salah satu

program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan/keuangan melalui kerjasama dengan agen bank yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Beberapa contoh perbankan yang telah memiliki program laku pandai adalah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki agen BRILink, Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki Agen46, Bank Mandiri memiliki Agen Bank mandiri, BRISyariah memiliki BRISSMART dan lain sebagainya. Produk-produk yang disediakan dalam program laku pandai adalah tabungan yang tidak memiliki batas minimum baik saldo maupun transaksi setor tunai yang umum disebut *Basic Saving Acount (BSA)*, kredit atau pembiayaan nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah-daerah secara sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada sekitar bulan Oktober 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK. Pembentukan Bank Wakaf Mikro didasari oleh keinginan dan komitmen besar OJK bersama Pemerintah, baik pusat maupun daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk berperan nyata dalam

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan penyediaan akses keuangan masyarakat yang mudah (tanpa agunan) dan murah (margin 3%), khususnya bagi usaha kecil, mikro dan bahkan ultra mikro, serta sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah diresmikan pada awal tahun 2018, sebanyak 20 bank wakaf telah mendapatkan izin usaha dari OJK dan telah memiliki 3.876 nasabah. Pada perkembangannya akhir tahun 2018 sudah ada 41 bank wakaf mikro yang berizin OJK dan sudah memiliki lebih dari 8.000 nasabah. Itulah beberapa contoh program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan serta untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya juga akan memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi nasional.

Hasil estimasi *Index Financial Inclusion* (IFI) konvensional dan syariah dari tiap-tiap dimensi (aksebilitas, availibilitas dan penggunaan) pada 33 Provinsi di Indonesia selama tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Sarma (2012) dapat peneliti jelaskan sebagai berikut. Bahwa pengukuran dalam *Index Financial Inclusion* ini dibagi menjadi tiga kategori. Kategori tersebut adalah:

a. *Index Financial Inclusion* dikategorikan rendah jika nilai IFI kurang dari atau sama dengan 0,3,
b. *Index Financial Inclusion* dikategorikan menengah jika nilai IFI lebih dari 0,3 dan kurang dari atau sama dengan 0,6,

c. *Index Financial Inclusion* dikategorikan tinggi jika nilai IFI lebih dari 0,6 dan kurang dari atau sama dengan 1,0.

Tujuan dari sistem keuangan inklusif salah satunya adalah memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu untuk mencapai sebuah sistem keuangan inklusif harus dapat dijangkau secara luas oleh pengguna. Salah satu ukuran untuk mengetahui penetrasi perbankan adalah proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank, dan indikator yang dapat mencerminkan ukuran ini adalah jumlah DPK di bank per 1000 penduduk dewasa. Dalam estimasi dimensi aksebilitas perbankan konvensional, penelitian ini menggunakan rasio nilai DPK pada perbankan konvensional yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap 1000 penduduk dewasa. Pada tahun 2015-2018, rata-rata total jumlah DPK perbankan per 1000 penduduk dewasa secara total di Indonesia adalah sekitar 37,96 miliar rupiah. Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata jumlah DPK pada perbankan tertinggi dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 544,59 miliar rupiah per 1000 penduduk dewasa.

Untuk estimasi dimensi aksebilitas perbankan syariah menggunakan rasio nilai DPK pada perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap 1000 penduduk dewasa. Pada tahun 2015-2018, rata-rata total jumlah DPK perbankan syariah per 1000 penduduk dewasa secara total di Indonesia adalah sekitar 2,24 miliar rupiah. Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi DKI

Jakarta memiliki rata-rata jumlah DPK pada perbankan tertinggi dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 31,12 miliar rupiah per 1000 penduduk dewasa. Adapun indeks dimensi penetrasi/aksebilitas perbankan konvensional dan syariah dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

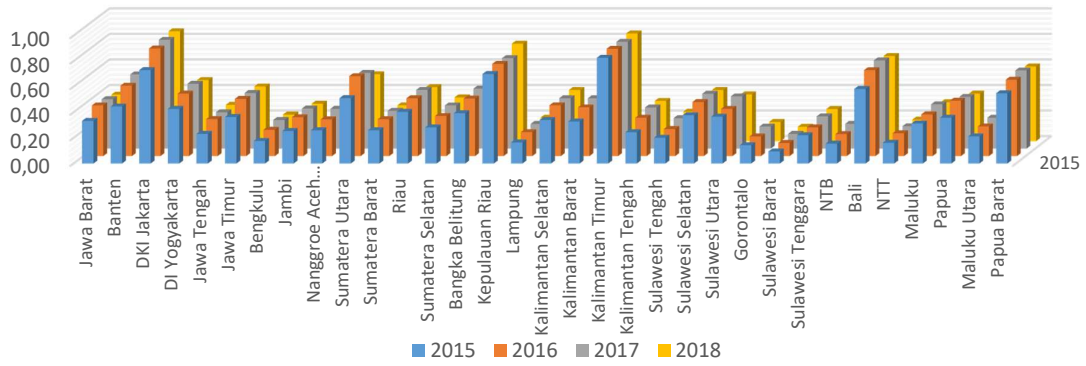

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (OJK) dan BPS RI, data diolah

Gambar 4.1.
Dimensi Aksebilitas (D_1) Konvensional pada 33 Provinsi

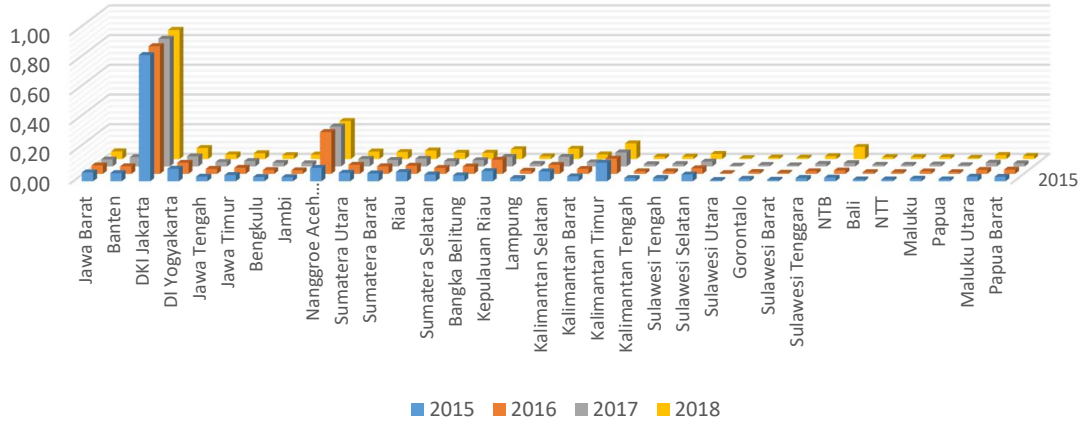

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK) dan BPS RI, data diolah

Gambar 4.2.
Dimensi Aksebilitas (D_1) Syariah pada 33 Provinsi

Dari gambar 4.1. dapat dijelaskan bahwa indeks dimensi aksebilitas perbankan konvensional selama tahun 2015 sampai dengan 2018 terendah sebesar 0,09 terjadi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,86 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Rata-rata indeks dimensi aksebilitas pada angka 0,38, ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dimensi penetrasi perbankan/aksebilitas *financial inclusion* konvensional Indonesia dalam posisi menengah.

Dari gambar 4.2. dapat dijelaskan bahwa indeks dimensi aksebilitas perbankan syariah selama tahun 2015 sampai dengan 2018 terendah sebesar 0,01 terjadi di beberapa provinsi seperti Papua, NTT, Sulawesi Utara, Maluku dan Bali. sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,87 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Secara keseluruhan rata-rata indeks dimensi aksebilitas syariah pada angka 0,07, ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dimensi penetrasi perbankan/aksebilitas *financial inclusion* syariah Indonesia dalam posisi rendah.

Selain penetrasi/aksebilitas perbankan, Tujuan lain dalam sistem keuangan inklusif adalah ketersediaan jasa perbankan. Ukuran ini menggambarkan jangkauan jasa perbankan sehingga masyarakat dapat mengakses jasa keuangan di mana pun berada. Indikator dari ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah outlet (kantor cabang, kantor unit, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, ketersediaan jasa perbankan konvensional diukur dengan jumlah kantor layanan bank konvensional dan bank perkreditan rakyat per 100.000 penduduk. Pada tahun 2015-2018, rata-

rata jumlah perbankan untuk melayani setiap 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 183,38 unit. Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang cukup terkait dengan ketersediaan layanan perbankan di daerah. Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi DKI Jakarta tetap menempati posisi teratas tingkat ketersediaan layanan perbankan konvensional dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 638 unit per 100.000 penduduk.

Sedangkan ketersediaan jasa perbankan syariah diukur dengan jumlah kantor layanan bank syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah per 100.000 penduduk. Pada tahun 2015-2018, rata-rata jumlah perbankan syariah untuk melayani setiap 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 3,17 unit. Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang sangat minim terkait dengan ketersediaan layanan perbankan syariah di daerah. Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menempati posisi teratas tingkat ketersediaan layanan perbankan syariah dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 9,05 unit per 100.000 penduduk dewasa dalam kurun waktu empat tahun. Adapun indeks dimensi ketersediaan layanan/availibilitas perbankan konvensional dan syariah dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

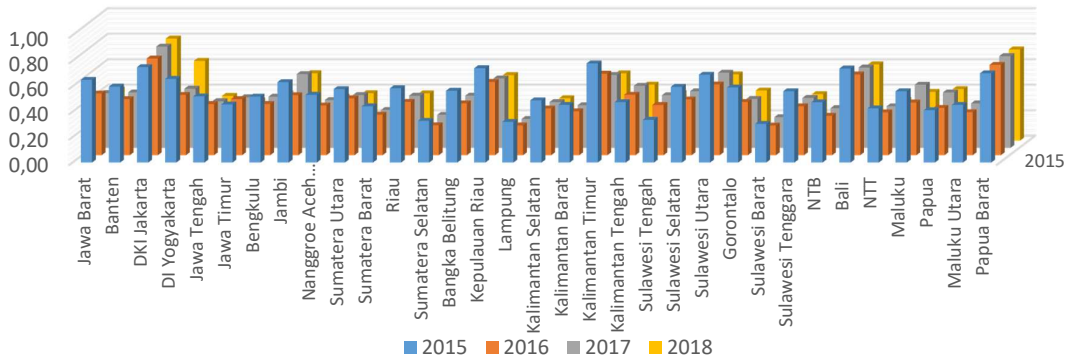

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (OJK) dan BPS RI, data diolah

Gambar 4.3.
Dimensi Availibilitas (D_2) Konvensional pada 33 Provinsi

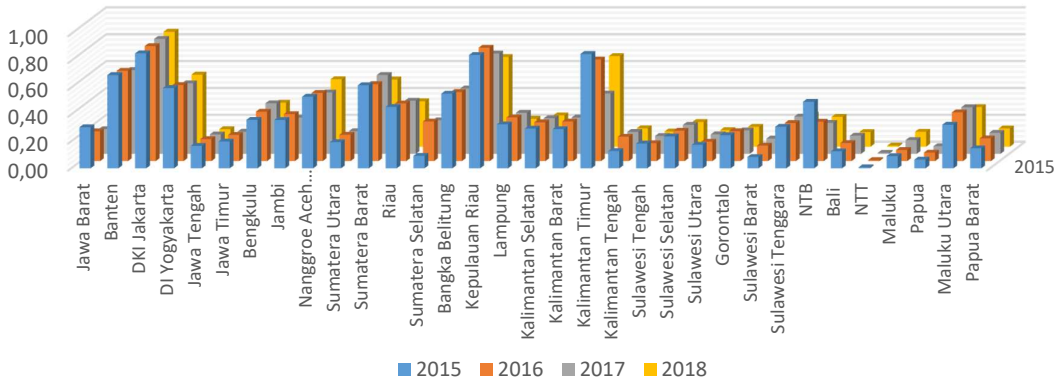

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK) dan BPS RI, data diolah

Gambar 4.4.
Dimensi Availibilitas (D_2) Syariah pada 33 Provinsi

Dari gambar 4.3. dapat dijelaskan bahwa indeks dimensi availibilitas perbankan konvensional selama tahun 2015 sampai dengan 2018 terendah sebesar 0,22 terjadi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,80 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 dan 2018. Rata-rata indeks dimensi availibilitas pada angka 0,46, ini

menunjukkan bahwa secara rata-rata dimensi availibilitas *financial inclusion* konvensional Indonesia dalam posisi menengah.

Dari gambar 4.4. dapat dijelaskan bahwa indeks dimensi aksebilitas perbankan syariah selama tahun 2015 sampai dengan 2018 terendah sebesar 0,01 terjadi di provinsi seperti NTT berturut-turut selama empat tahun, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,86 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Secara keseluruhan rata-rata indeks dimensi availibilitas syariah pada angka 0,31, ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dimensi availibilitas *financial inclusion* syariah Indonesia dalam posisi menengah.

Selain penetrasi perbankan dan ketersediaan jasa perbankan, keberadaan jasa keuangan pun harus memiliki cukup manfaat bagi masyarakat. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari keberadaan jasa keuangan antara lain berupa transfer, deposito, pinjaman, dan lain sebagainya. Maka, indikator penggunaan dimasukkan ke dalam pengukuran sistem keuangan inklusif. Dalam penelitian ini, indikator penggunaan perbankan konvensional dilihat dari proporsi jumlah kredit oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap nilai PDRB pada tiap provinsi selama tahun 2015-2018. Untuk indikator penggunaan perbankan syariah dilihat dari proporsi jumlah kredit oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap nilai PDRB pada tiap provinsi selama tahun 2015-2018. Adapun indeks dimensi penggunaan

perbankan konvensional dan syariah dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

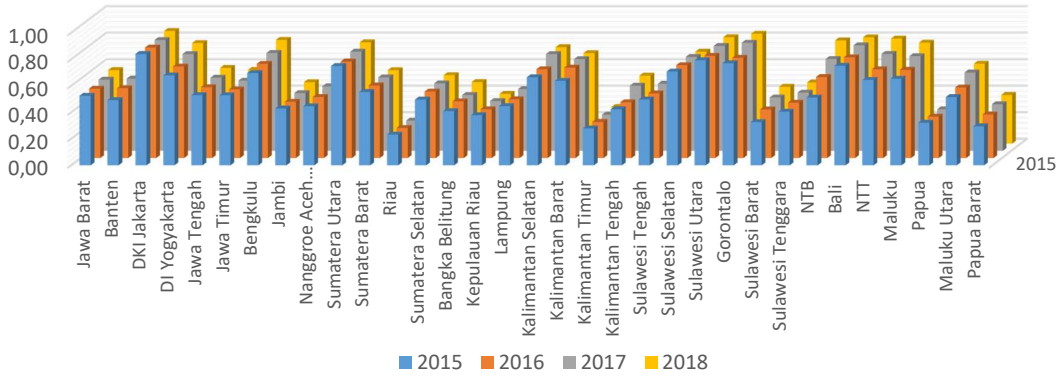

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (OJK) dan Bank Indonesia, data diolah

Gambar 4.5.
Dimensi Penggunaan (D_3) Konvensional pada 33 Provinsi

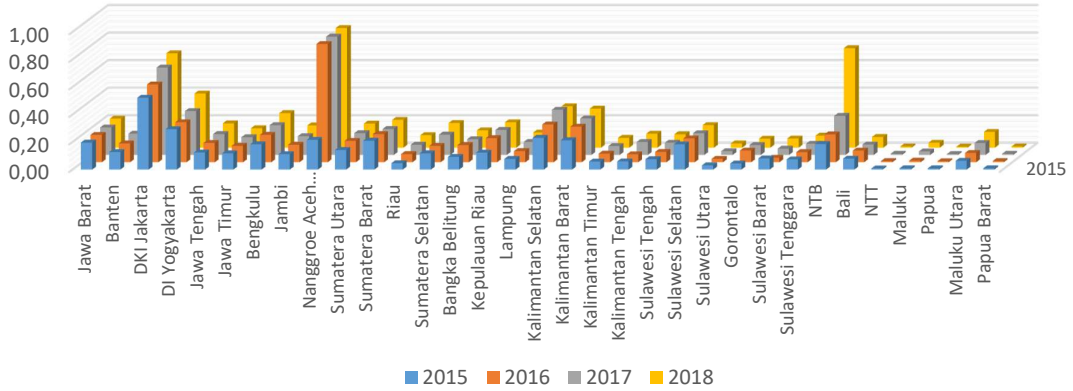

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK) dan Bank Indonesia, data diolah

Gambar 4.6.
Dimensi Penggunaan (D_3) Syariah pada 33 Provinsi

Dari gambar 4.5. dapat dijelaskan bahwa indeks dimensi penggunaan perbankan konvensional selama tahun 2015 sampai dengan 2018 terendah

sebesar 0,23 terjadi di provinsi Riau pada tahun 2015 sampai dengan 2017, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,85 terjadi di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Rata-rata indeks dimensi penggunaan pada angka 0,56, ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dimensi penggunaan *financial inclusion* konvensional Indonesia dalam posisi menengah.

Dari gambar 4.6. dapat dijelaskan bahwa indeks dimensi penggunaan perbankan syariah selama tahun 2015 sampai dengan 2018 terendah sebesar 0,01 terjadi di beberapa provinsi seperti NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat berturut-turut selama empat tahun, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,87 terjadi di provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2018. Secara keseluruhan rata-rata indeks dimensi penggunaan syariah pada angka 0,16, ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dimensi penggunaan *financial inclusion* syariah Indonesia dalam posisi rendah, hanya dibeberapa provinsi saja yang memiliki indeks bernilai tinggi.

Setelah mengetahui nilai indeks dari masing-masing dimensi seperti aksebilitas, availibilitas dan penggunaan, maka selanjutnya dapat dihitung berapa nilai *index financial incusion* dari masing-masing provinsi. Adapaun hasil dari analisis *Indeks Financial Inclusion* perbankan konvensional pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. *Indeks Financial Inclusif* Konvensional Indonesia

Tahun 2015 – 2018

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018
1	JAWA BARAT	0,609	0,596	0,590	0,588
2	BANTEN	0,608	0,617	0,628	0,652
3	D K I JAKARTA	0,779	0,774	0,773	0,777
4	D.I. YOGYAKARTA	0,694	0,691	0,712	0,737
5	JAWA TENGAH	0,569	0,561	0,561	0,566
6	JAWA TIMUR	0,586	0,595	0,590	0,583
7	BENGKULU	0,628	0,622	0,639	0,646
8	J A M B I	0,550	0,529	0,556	0,554
9	ACEH	0,540	0,524	0,538	0,534
10	SUMATERA UTARA	0,735	0,719	0,720	0,712
11	SUMATERA BARAT	0,571	0,549	0,549	0,538
12	R I A U	0,491	0,466	0,466	0,455
13	SUMATERA SELATAN	0,525	0,513	0,528	0,529
14	BANGKA BELITUNG	0,558	0,547	0,549	0,555
15	RIAU ISLANDS	0,613	0,593	0,590	0,592
16	LAMPUNG	0,472	0,456	0,466	0,465
17	KALIMANTAN SELATAN	0,651	0,643	0,669	0,662
18	KALIMANTAN BARAT	0,629	0,640	0,645	0,651
19	KALIMANTAN TIMUR	0,595	0,580	0,571	0,568
20	KALIMANTAN TENGAH	0,515	0,527	0,566	0,565
21	SULAWESI TENGAH	0,508	0,520	0,539	0,531
22	SULAWESI SELATAN	0,693	0,678	0,684	0,662
23	SULAWESI UTARA	0,732	0,717	0,738	0,727
24	GORONTALO	0,659	0,630	0,652	0,653
25	SULAWESI BARAT	0,398	0,401	0,422	0,429
26	SULAWESI TENGGARA	0,520	0,489	0,506	0,510
27	NUSA TENGGARA BARAT	0,534	0,548	0,591	0,634
28	B A L I	0,745	0,752	0,766	0,768
29	NUSA TENGGARA TIMUR	0,586	0,582	0,606	0,628
30	M A L U K U	0,650	0,635	0,677	0,667
31	PAPUA	0,482	0,486	0,494	0,482
32	MALUKU UTARA	0,545	0,533	0,565	0,558
33	PAPUA BARAT	0,559	0,580	0,591	0,593
RATA-RATA NASIONAL		**0,592**	**0,585**	**0,598**	**0,599**

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (OJK), BPS RI dan Bank Indonesia, data diolah

Dapat dilihat pada tabel 4.2. diatas, nilai *index financial incusion* perbankan konvensional di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai *index financial incusion* tertinggi selama kurun waktu empat tahun dengan nilai rata-rata selama periode 2015-2018 sebesar 0,776 sehingga dikategorikan provinsi yang memiliki IFI tinggi. Tidak dapat dipungkiri DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian di Indonesia, jika dilihat dari total DPK, total kantor pelayanan dan total penyaluran kredit, nilainya jauh tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Selain provinsi DKI Jakarta, ada beberapa provinsi yang masuk dalam kategori *index financial incusion* tinggi (nilai ≥ 0,6) antara lain: Banten, D.I. Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, dan Maluku. Provinsi yang lainnya masuk pada kategori menengah (nilai > 0,3 s/d < 0,6), dan tidak ada provinsi yang masuk dalam kategori *index financial incusion* rendah (nilai ≤ 0,3). Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2 total rata-rata *index financial incusion* perbankan konvensional di Indonesia yaitu sebesar 0,599 pada tahun 2018, Indonesia masuk dalam kategori *index financial incusion* menengah selama periode penelitian. Selama kurun waktu empat tahun *index financial incusion* perbankan konvensional mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Selanjutnya, hasil dari analisis *Indeks Financial Inclusion* perbankan syariah pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3. *Indeks Financial Inclusif* Syariah Indonesia

Tahun 2015 – 2018

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018
1	JAWA BARAT	0,197	0,166	0,150	0,151
2	BANTEN	0,323	0,317	0,306	0,281
3	D K I JAKARTA	0,729	0,748	0,775	0,798
4	D.I. YOGYAKARTA	0,340	0,326	0,319	0,347
5	JAWA TENGAH	0,114	0,119	0,115	0,120
6	JAWA TIMUR	0,127	0,125	0,116	0,116
7	BENGKULU	0,207	0,214	0,222	0,215
8	J A M B I	0,187	0,186	0,156	0,152
9	ACEH	0,296	0,545	0,526	0,538
10	SUMATERA UTARA	0,137	0,142	0,131	0,128
11	SUMATERA BARAT	0,316	0,298	0,297	0,270
12	R I A U	0,217	0,208	0,197	0,179
13	SUMATERA SELATAN	0,088	0,165	0,154	0,156
14	BANGKA BELITUNG	0,261	0,255	0,240	0,217
15	RIAU ISLANDS	0,375	0,394	0,357	0,331
16	LAMPUNG	0,163	0,163	0,158	0,123
17	KALIMANTAN SELATAN	0,206	0,217	0,229	0,210
18	KALIMANTAN BARAT	0,191	0,208	0,200	0,169
19	KALIMANTAN TIMUR	0,375	0,340	0,226	0,314
20	KALIMANTAN TENGAH	0,076	0,097	0,099	0,091
21	SULAWESI TENGAH	0,104	0,082	0,086	0,081
22	SULAWESI SELATAN	0,164	0,154	0,144	0,135
23	SULAWESI UTARA	0,086	0,071	0,072	0,063
24	GORONTALO	0,121	0,120	0,097	0,083
25	SULAWESI BARAT	0,063	0,060	0,063	0,063
26	SULAWESI TENGGARA	0,155	0,144	0,143	0,129
27	NUSA TENGGARA BARAT	0,259	0,186	0,192	0,363
28	B A L I	0,079	0,084	0,082	0,072
29	NUSA TENGGARA TIMUR	0,010	0,009	0,010	0,010
30	M A L U K U	0,046	0,043	0,054	0,061
31	PAPUA	0,034	0,032	0,029	0,023
32	MALUKU UTARA	0,161	0,177	0,175	0,161
33	PAPUA BARAT	0,075	0,083	0,076	0,067
RATA-RATA NASIONAL		**0,190**	**0,196**	**0,188**	**0,188**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK), BPS RI dan Bank Indonesia, data diolah

Dapat dilihat pada tabel 4.3., nilai *index financial incusion* perbankan syariah di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan

bahwa provinsi DKI Jakarta tetap merupakan provinsi dengan nilai *index financial incusion* syariah tertinggi selama kurun waktu empat tahun dengan nilai rata-rata selama periode 2015-2018 sebesar 0,763 sehingga dikategorikan provinsi yang memiliki IFI Syariah tinggi jauh diatas provinsi yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa DKI Jakarta adalah pusat dari segalanya, Jakarta memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dari provinsi yang lain. Perekonomian DKI Jakarta sangat ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif dan keuangan.

Pada estimasi *index financial incusion* perbankan syariah, tidak ada provinsi yang masuk dalam kategori *index financial incusion* syariah tinggi (nilai ≥ 0,6) selain provinsi DKI Jakarta. Hanya 5 (lima) provinsi yang masuk kategori *index financial incusion* perbankan syariah menengah (nilai > 0,3 s/d < 0,6) di tahun 2018 yaitu: D.I. Yogyakarta, Nangroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 total rata-rata *index financial incusion* perbankan syariah di Indonesia yaitu sebesar 0,188 pada tahun 2018, menunjukkan tren menurun jika dilihat dalam kurun waktu 4 (empat tahun terakhir. Indonesia masuk dalam kategori *index financial incusion* syariah rendah selama periode penelitian.

Melihat kondisi perbankan syariah yang terus mengalami penurunan pada *index financial inclusion*, sehingga pengambil kebijakan perlu untuk meningkatkan aksebilitas, availabilitas dan penggunaan keuangan syariah

dengan menambah dan memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia kawasan timur Indonesia khususnya.

2. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

Dari hasil laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2017 penyaluran pembiayaan meningkat sebesar 15,23% *(yoy)*, atau turun sebesar 1,18% *(yoy)* dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan di tahun 2016 yang mencapai 16,41%. Pada tahun 2018 penyaluran pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 12,21% *(yoy)*, melambat 3,02% dibandingkan tahun 2017. Perlambatan ini disebabkan oleh masih terfokusnya industri perbankan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan.

Jika Dilihat dari jenis penggunaan dan kategori usaha, pembiayaan perbankan syariah yang dialokasikan untuk sektor produktif mencapai 58,22%, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 59,40%. Sektor produktif ini terdiri atas 35,02% pembiayaan modal kerja dan 23,20% pembiayaan investasi. Kontribusi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing memiliki porsi sebesar 35,38% dan 24,02%. Sementara itu, porsi pembiayaan konsumtif

mengalami peningkatan dari yang sebesar 40,60% pada tahun 2016 menjadi sebesar 41,78% pada tahun 2017.

Sedangkan pada tahun 2018 pembiayaan modal kerja terjadi perlambatan sebesar 2,08% dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang tercatat sebesar 14,07% *(yoy).* Pertumbuhan pembiayaan Konsumsi sedikit turun diangka 17,25% *(yoy)*, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 18,94% *(yoy).* Sementara, pembiayaan Investasi mampu tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya 11,30% *(yoy)* menjadi 13,17% (*yoy)*. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

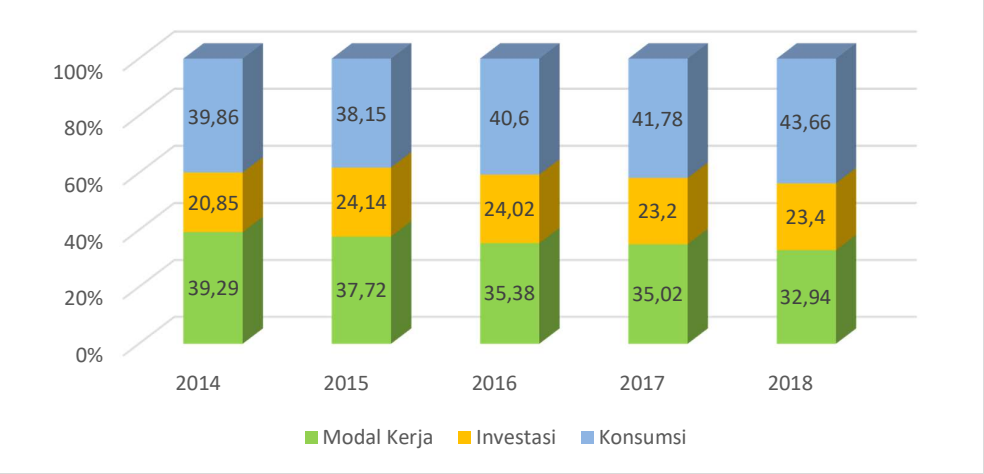

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Gambar 4.7.
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2014-2018

Adapun perkembangan pembiayaan perbankan syariah sektor UMKM Provinsi pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Pembiayaan Perbankan Syariah sektor UMKM Provinsi Tahun 2015 – 2018 (Juta Rupiah)

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018
1	JAWA BARAT	10.188.053,15	10.353.537,40	10.125.802,40	9.762.158,87
2	BANTEN	2.101.927,89	2.023.420,11	2.141.831,45	1.937.737,22
3	DKI JAKARTA	10.702.127,72	11.750.542,67	15.401.497,11	18.746.355,22
4	D.I YOGYAKARTA	1.144.007,51	1.124.805,39	1.199.613,65	1.285.587,34
5	JAWA TENGAH	5.126.913,29	6.001.076,70	5.994.473,63	5.959.216,27
6	JAWA TIMUR	6.379.018,62	6.796.760,28	7.428.734,41	7.810.526,76
7	BENGKULU	482.158,40	483.900,32	526.404,80	527.949,54
8	JAMBI	847.269,49	819.662,57	715.367,16	643.751,91
9	ACEH	596.760,00	1.694.949,43	1.759.748,96	1.741.349,26
10	SUMATERA UTARA	3.094.395,14	3.324.917,91	3.400.026,56	3.420.764,42
11	SUMATERA BARAT	1.296.088,80	1.250.685,37	1.311.430,01	1.297.016,43
12	RIAU	1.283.093,02	1.289.487,21	1.293.117,88	1.318.341,79
13	SUMATERA SELATAN	1.390.968,98	1.403.083,08	1.494.859,85	1.640.401,08
14	BANGKA BELITUNG	390.607,39	437.434,60	417.181,66	473.822,61
15	KEPULAUAN RIAU	423.737,78	468.130,98	402.560,55	353.555,54
16	LAMPUNG	1.072.774,11	1.304.309,57	1.277.107,46	1.246.548,58
17	KALIMANTAN SELATAN	914.337,32	884.119,99	1.027.095,39	919.547,41
18	KALIMANTAN BARAT	927.565,16	1.468.667,76	1.594.576,52	1.781.987,25
19	KALIMANTAN TIMUR	1.370.143,69	1.126.231,52	1.343.178,46	1.477.382,75
20	KALIMANTAN TENGAH	217.917,98	238.049,30	233.615,38	269.171,02
21	SULAWESI TENGAH	276.439,09	273.135,27	232.081,19	220.449,32
22	SULAWESI SELATAN	1.461.427,22	1.547.416,58	1.543.110,77	1.258.933,49
23	SULAWESI UTARA	173.934,91	142.790,12	130.553,86	114.497,69
24	GORONTALO	74.672,78	64.791,01	49.845,08	35.276,56
25	SULAWESI BARAT	20.753,27	14.854,38	16.920,26	14.217,81
26	SULAWESI TENGGARA	265.484,50	268.676,13	266.458,59	273.623,21
27	NUSA TENGGARA BARAT	865.365,56	947.921,70	1.006.347,29	1.657.572,17
28	BALI	310.750,90	371.585,39	483.253,67	463.888,92
29	NUSA TENGGARA TIMUR	73.022,34	65.486,28	54.834,55	59.035,73
30	MALUKU	30.948,98	25.317,02	14.916,04	14.308,54
31	PAPUA	179.116,21	165.347,30	155.182,26	137.530,55
32	MALUKU UTARA	69.771,67	69.120,93	71.440,93	78.552,22
33	PAPUA BARAT	63.774,93	73.506,62	53.272,54	33.622,24
TOTAL		**53.959.373,35**	**58.393.670,05**	**63.166.440,34**	**66.974.679,75**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan pembiayaan sektor UMKM tertinggi dari tahun 2015 hingga 2018 adalah Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2018 DKI Jakarta mampu menyerap pembiayaan sektor UMKM sebesar Rp. 18.74 triliun atau sekitar 27,98% dari total pembiayaan syariah pada sektor UMKM. Terdiri dari modal kerja sebesar Rp. 9,10 triliun dan investasi sebesar Rp. 9,64 triliun. DKI Jakarta masih tetap memegang peran penting menjadi pusat perekonomian di Indonesia dan Provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan provinsi yang paling rendah menyerap pembiayaan UMKM adalah provinsi Sulawesi Barat, yang hanya mampu menyerap sebesar Rp. 14.21 miliar pada tahun 2018, terjadi penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meskipun dilihat dari total pembiayaan secara nasional meningkat, ada beberapa provinsi mengalami penurunan pembiayaan pada sektor UMKM. Ini terjadi karena pada tahun 2018 beberapa perbankan syariah ingin memperbaiki kualitas pembiayaan di beberapa daerah, sehingga perbankan syariah lebih hati-hati dalam penyaluran pembiayaannya. Selain itu, di tahun yang sama perekonomian Indonesia maupun global juga mengalami kelesuan.

3. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia

Usaha mikro Kecil dan Menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan

karena memerlukan modal yang relatif kecil. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa presentase Usaha mikro Kecil dan Menengah di Indonesia mencapai 98,68 persen dari total jumlah usaha di Indonesia. Jumlah UMKM terbesar adalah di pulau Jawa yang mencapai 60 persen lebih dari jumlah UMKM di Indonesia. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan jumlah tertinggi di Indonesia. Presentase Jumlah UMKM menurut Kategori Lapangan Usaha dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

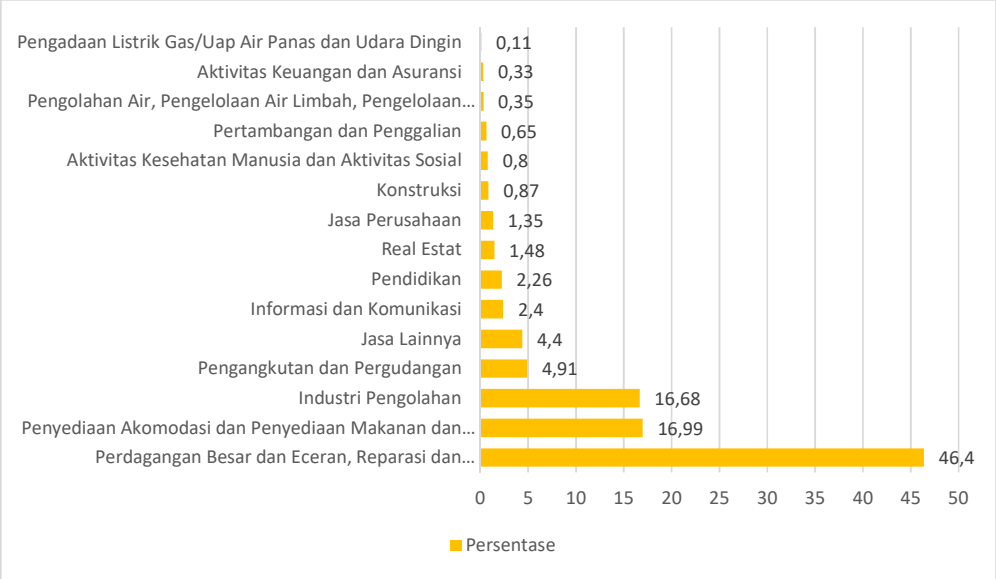

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.8.
Persentase Jumlah UMKM menurut Kategori Lapangan Usaha tahun 2017

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Jumlah UMKM tersebar pada semua kategori non pertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor mendominasi jumlah UMKM dengan jumlah mencapai 46,40 persen. Usaha Penyediaan

Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum hampir mencapai 17 persen, sama halnya dengan Usaha Industri Pengolahan yang mencapai 16,68 persen. Presentase terendah adalah Usaha Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin hanya mencapai 0,11 persen. Adapun jumlah UMKM pada tahun 2017 menurut provinsi adalah sebagai gambar berikut.

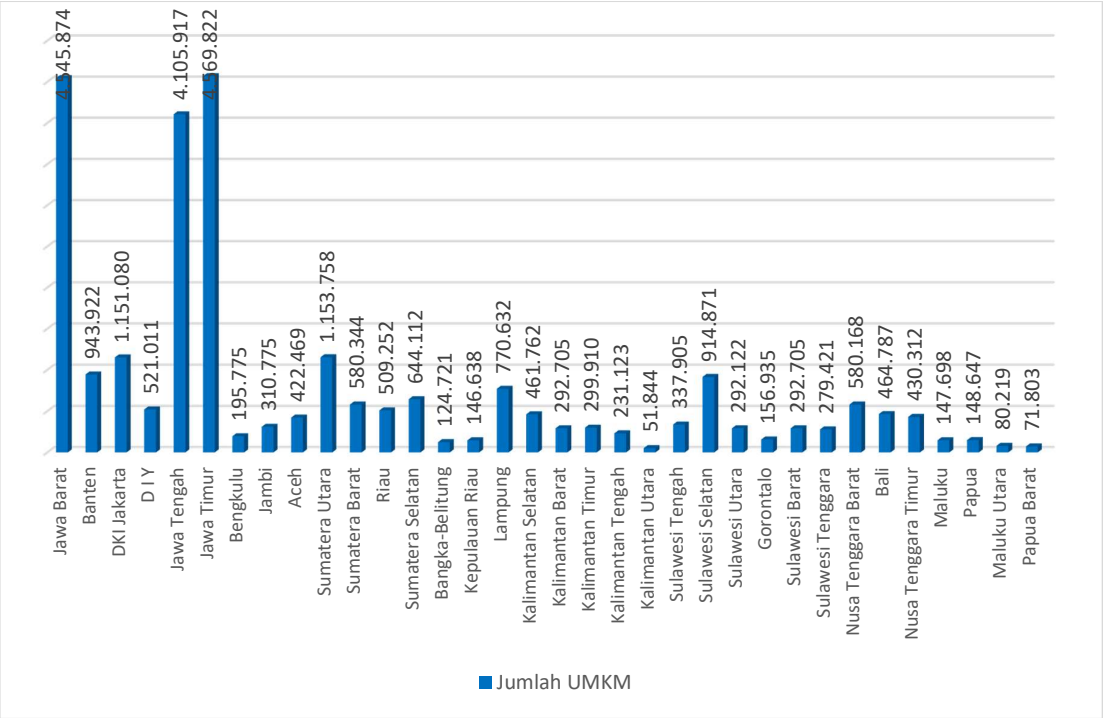

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.9.
Jumlah UMKM per Provinsi tahun 2017

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Jumlah UMKM banyak terkonsentrasi di pulau jawa, Pertama provinsi Jawa Timur sebanyak 4.569.822 usaha, kedua Jawa Barat sebanyak 4.545.874 usaha, dan ketiga Jawa Tengah sebanyak 4.105.917 usaha. Sementara di luar pulau jawa jumlah UMKM tertinggi adalah Sumatera Utara sebanyak 1.153.758 usaha

dan Sulawesi Selatan sebanyak 914.871 usaha. Apabila dilihat dari jumlah UMKM tersebut, maka sebaran jumlah UMKM juga mengikuti sebaran jumlah penduduk pada tiap provinsi. Di setiap Provinsi UMKM menjadi kekuatan tersendiri dalam pergerakan perekonomian regional. Dalam catatan Badan Pusat Statistik 2017 menunjukkan bahwa hampir disetiap provinsi domininasi UMKM lebih dari 98 persen dari total semua usaha.

Dengan jumlah UMKM yang sangat besar di Indonesia tentunya juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran masyarakat. Penyerapan tenaga kerja UMKM paling banyak terjadi pada Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai sepertiga dari jumlah tenaga kerja UMKM keseluruhan. Sementara itu Usaha Industri Pengolahan dan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja. Adapun jumlah tenaga kerja UMKM tiap provinsi pada tahun 2017 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:

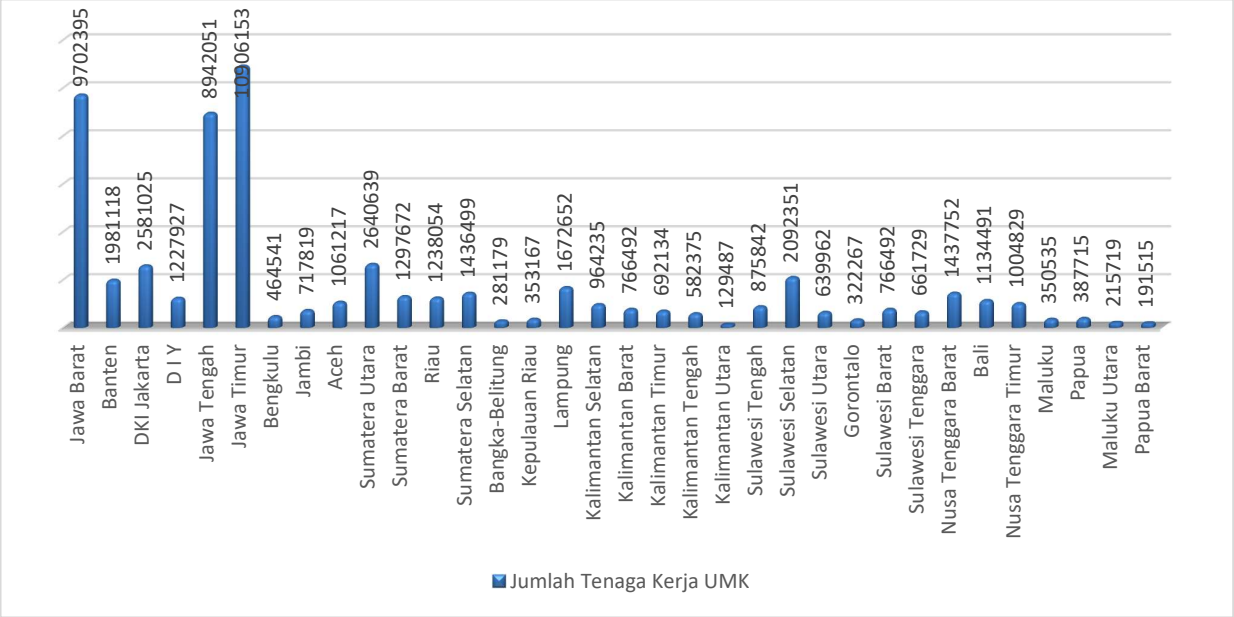

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.10.
Jumlah Tenaga Kerja UMKM per Provinsi tahun 2017

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Tenaga Kerja UMKM secara otomatis banyak terkonsentrasi di pulau jawa, tentunya hal ini juga sangat dipengaruhi oleh jumlah UMKM yang ada pada tiap Provinsi. Pertama provinsi Jawa Timur sebanyak 10.906.153 tenaga kerja, kedua Jawa Barat sebanyak 9.702.395 tenaga kerja, dan ketiga Jawa Tengah sebanyak 8.942.051 tenaga kerja. Sementara di luar pulau jawa jumlah tenaga kerja UMKM tertinggi adalah Sumatera Utara sebanyak 2.640.639 tenaga kerja dan Sulawesi Selatan sebanyak 2.092.351 tenaga kerja. Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja UMKM tersebut, maka sebaran jumlah tenaga kerja UMKM mengikuti sebaran jumlah usaha UMKM pada tiap provinsi. Kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota berusaha sekuat tenaga untuk menumbuh kembangkan UMKM yang ada pada

wilayahnya, sehingga target untuk membuka lapangan kerja baru dapat tercapai.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam berproduksi. Adanya peningkatan jumlah tenaga kerja menggambarkan bahwa kapasitas produksi yang dihasilkan juga akan meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif (usia 15 tahun ke atas) pada bulan Agustus 2018 mencapai 194,7 juta juta orang. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada bulan Agustus 2018 mencapai 131,01 juta orang, bertambah 2,95 juta orang (2,30 persen) jika dibandingkan dengan angkatan kerja pada bulan Agustus 2017 sebesar 128,06 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebesar 124,01 juta orang, bertambah 2,99 juta orang (2,47 persen) bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2017 sebesar 121,02 juta orang. Perkembangan Tenaga Kerja di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

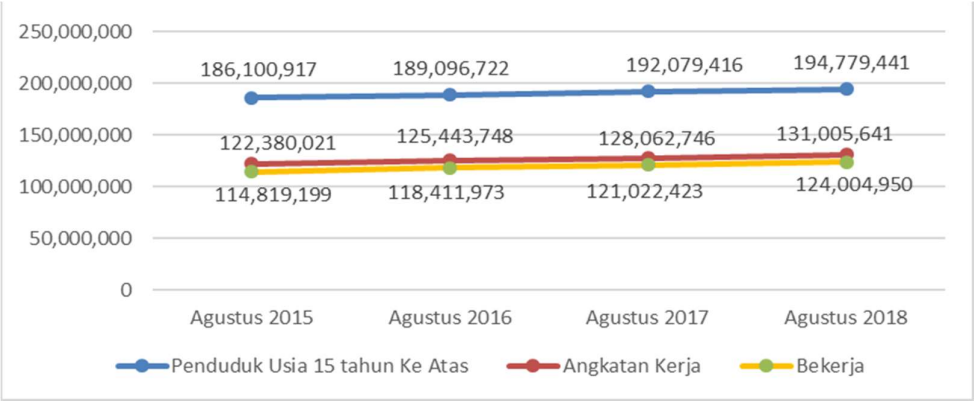

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.11.
Perkembangan Tenaga Kerja di Indonesia tahun 2015-2018

Adapun presentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dapat digambarkan pada gambar grafik berikut.

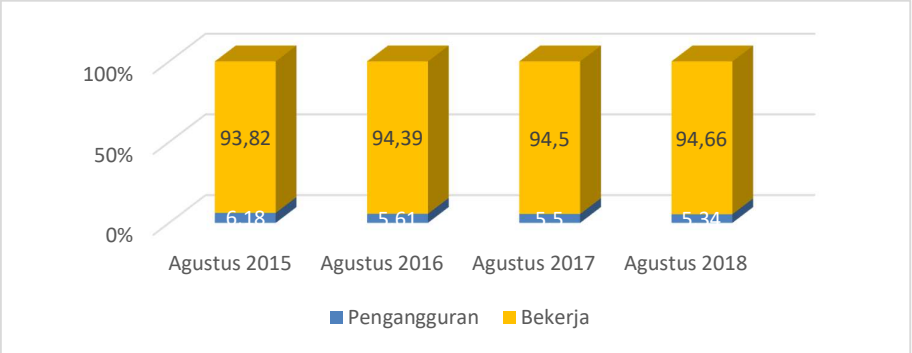

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.12.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2015 -2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia yang sudah bekerja pada tahun 2018 sebesar 94,66 persen dari total angkatan kerja dan menyisakan pengangguran sebesar 5,34 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, presentase usia produktif yang bekerja hanya meningkat sebesar 0,16 persen dari total angkatan kerja. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja mencapai 35,70 juta orang (28,79 persen) pada tahun 2018 dan Industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 14,72 persen. Ini menunjukkan bahwa sektor informal pertanian adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja informal sektor Pertanian Provinsi pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Tenaga Kerja Sektor UMKM Provinsi Tahun 2015 – 2018

NO.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018
1	JAWA BARAT	16.160.675	16.724.975	18.332.005	17.901.874
2	BANTEN	4.312.514	4.534.869	4.752.954	4.691.530
3	D K I JAKARTA	2.263.282	2.295.757	1.717.092	2.303.832
4	D.I. YOGYAKARTA	1.773.773	1.953.760	1.983.976	2.017.768
5	JAWA TENGAH	14.873.804	15.229.872	15.861.581	15.817.617
6	JAWA TIMUR	17.372.896	17.289.122	17.948.603	18.713.748
7	BENGKULU	804.661	848.113	829.136	864.612
8	J A M B I	1.147.298	1.302.542	1.295.750	1.287.579
9	ACEH	1.673.278	1.789.015	1.856.015	1.862.802
10	SUMATERA UTARA	4.895.052	5.032.033	5.157.088	5.419.751
11	SUMATERA BARAT	1.879.192	2.003.472	2.111.647	2.157.112
12	R I A U	1.675.874	2.113.459	2.048.500	2.212.063
13	SUMATERA SELATAN	2.866.514	3.109.740	3.316.854	3.269.004
14	BANGKA BELITUNG	491.048	526.249	496.123	534.721
15	RIAU ISLANDS	639.969	638.411	676.465	729.285
16	LAMPUNG	3.191.029	3.492.979	3.446.215	3.688.853
17	KALIMANTAN SELATAN	1.566.397	1.702.945	1.716.217	1.718.214
18	KALIMANTAN BARAT	1.908.106	1.917.882	1.895.762	1.918.341
19	KALIMANTAN TIMUR	981.249	1.551.986	1.095.882	1.116.940
20	KALIMANTAN TENGAH	835.701	1.045.358	910.550	907.189
21	SULAWESI TENGAH	1.189.632	1.355.719	1.294.647	1.345.532
22	SULAWESI SELATAN	3.217.109	3.417.239	3.362.231	3.511.812
23	SULAWESI UTARA	919.429	969.856	915.823	944.015
24	GORONTALO	432.322	498.233	453.324	497.535
25	SULAWESI BARAT	550.855	573.124	534.076	578.453
26	SULAWESI TENGGARA	1.014.613	1.175.766	1.109.078	1.137.695
27	NUSA TENGGARA BARAT	2.058.785	2.277.115	2.242.817	2.074.852
28	B A L I	2.144.633	2.251.746	2.242.417	2.324.978
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2.170.910	2.234.942	2.255.331	2.353.897
30	M A L U K U	613.598	659.701	602.767	640.911
31	PAPUA	1.639.532	1.643.013	1.675.964	1.747.172
32	MALUKU UTARA	443.650	454.138	438.719	492.464
33	PAPUA BARAT	353.002	377.333	369.358	381.218
TOTAL		**98.060.380**	**102.990.466**	**104.944.968**	**107.163.368**

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat tenaga kerja informal sektor pertanian selama tahun 2015 hingga 2018 dari 33 Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tertinggi adalah Jawa Timur sebesar 18.713.748 orang, menunjukkan peningkatan dibanding dengan tahun 2017. Kedua Jawa Barat

sebesar 17.901.874 orang, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017. Ketiga adalah Jawa Tengah sebesar 15.817.617 orang, di tahun 2018 Jawa Tengah juga mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

4. Perkembangan Ekspor Indonesia

Ekspor adalah hasil produksi dalam negeri yang dijual kepada masyarakat negara lain dan juga merupakan salah satu injeksi untuk meningkatkan neraca perdagangan dalam negeri. Ekspor merupakan salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari kegiatan ekspor inilah dapat terjamin kegiatan bisnis di sektor riil semakin terjaga. Sehingga produksi barang tidak hanya berputar dalam negeri saja, akan tetapi dapat berputar di perdagangan internasional. Perkembangan ekspor Indonesia tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

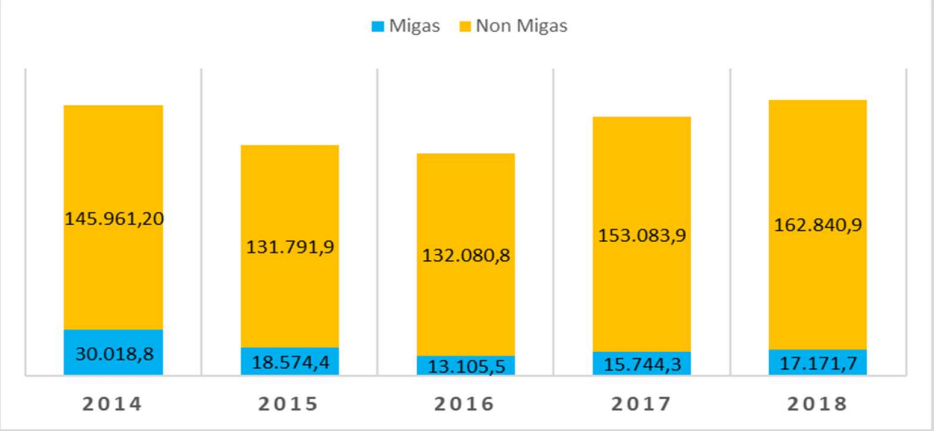

Sumber: Kementerian Perdagangan, data diolah

Gambar 4.13.
Perkembangan Ekspor Indonesia tahun 2014 -2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan ekspor mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 nilai ekspor terendah terjadi pada tahun 2016, disaat ekspor nonmigas mengalami peningkatan sebesar US$ 288,9 juta, ekspor migas mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar US$ 5.468.9 juta jika dibandingkan dengan tahun 2015. Melemahnya ekspor Indonesia di tahun 2016 dikarenakan oleh melemahnya harga minyak dunia yang mencapai US$ 28,94 per barel yang merupakan harga terendah selama 13 tahun terakhir.

Pada tahun 2018 Ekspor Indonesia mengalami peningkatan positif sebesar US$ 180.012,7 juta, terdiri dari US$ 17.171,7 juta hasil ekspor minyak dan gas bumi dan US$ 162.840,9 juta merupakan hasil ekspor komoditi nonmigas. Jika dibandingkan dengan periode 2017, nilai ekspor naik sebesar US$ 11.184,5 juta, nilai ekspor Migas naik sebesar US$ 1.427,4 juta dan nonmigas naik sebesar US$ 9.757 juta. Jika dilihat dari masing-masing provinsi di Indonesia, perkembangan ekspor non migas selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6. Perkembangan Ekspor Non Migas Provinsi Tahun 2014 – 2018 (Juta US$)

NO.	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	JAWA BARAT	26.276,80	24.271,90	25.280,00	28.969,20	30.120,50
2	BANTEN	10.212,70	4.391,70	9.287,90	11.213,60	11.864,40
3	D K I JAKARTA	11.500,10	18.293,20	10.972,60	9.129,70	9.718,30
4	D.I. YOGYAKARTA	329	111	333,7	390,7	424,7
5	JAWA TENGAH	6.104,60	5.679,80	6.314,20	7.227,90	8.091,60
6	JAWA TIMUR	17.376,30	15.559,80	17.354,10	17.177,80	17.780,30
7	BENGKULU	241,4	129,7	158,9	275,3	271,9
8	J A M B I	1.017,80	1.103,90	986,3	1.438,80	1.284,10

NO.	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
9	ACEH	23,1	294,1	56,1	146,7	250,7
10	SUMATERA UTARA	9.162,00	7.624,80	7.655,90	8.855,00	8.466,90
11	SUMATERA BARAT	1.851,90	1.758,30	1.494,20	1.900,40	1.590,40
12	R I A U	16.977,50	10.729,50	11.233,00	14.005,30	13.300,30
13	SUMATERA SELATAN	2.489,00	1.929,40	1.912,30	3.784,60	4.014,20
14	BANGKA BELITUNG	1.904,20	1.300,30	1.195,20	1.669,10	1.633,60
15	RIAU ISLANDS	5.317,90	8.262,20	8.806,30	8.703,70	9.051,70
16	LAMPUNG	3.895,60	3.873,10	3.191,70	3.873,30	3.437,40
17	KALIMANTAN SELATAN	7.810,80	4.288,20	5.359,60	7.332,40	8.224,10
18	KALIMANTAN BARAT	658,7	557,5	625,6	1.373,60	1.510,20
19	KALIMANTAN TIMUR	15.486,30	11.953,40	10.181,30	13.391,70	15.258,20
20	KALIMANTAN TENGAH	1.096,60	2.461,10	966,3	1.800,50	1.901,40
21	SULAWESI TENGAH	42,2	245,2	823,2	1.931,30	3.632,30
22	SULAWESI SELATAN	1.776,20	1.420,90	1.172,30	1.184,50	1.455,00
23	SULAWESI UTARA	1.175,80	845,1	1.019,90	972,3	974,1
24	GORONTALO	15,4	32	5,3	2,4	35,2
25	SULAWESI BARAT	258,5	287	350,5	385,9	430
26	SULAWESI TENGGARA	351,6	231,4	219,2	382,8	1.082,20
27	NUSA TENGGARA BARAT	316	1.483,60	1.585,70	1.113,20	471,1
28	B A L I	536,2	362,4	504,2	536,5	595,8
29	NUSA TENGGARA TIMUR	18,6	22,1	51,7	65,7	59,8
30	M A L U K U	114	13,4	116,7	45,4	37,1
31	PAPUA	1.529,70	2.007,50	2.023,00	2.540,60	3.941,70
32	MALUKU UTARA	29,8	10,4	35,1	272,5	680,3
33	PAPUA BARAT	64,7	15,2	26,6	31,6	37,2
NON MIGAS		**145.961,20**	**131.791,90**	**132.080,80**	**153.083,90**	**162.840,90**

Sumber: Kementerian Perdagangan, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan ekspor non migas selama tahun 2014-2018 dari 34 Provinsi di Indonesia menunjukkan tahun 2018 ekspor tertinggi adalah Jawa Barat sebesar US$ 30.120,50 juta, kedua Jawa Timur sebesar US$ 17.780,30 juta dan ketiga adalah Kalimantan Timur sebesar US$ 15.258,20 juta. Ini menunjukkan bahwa ekspor non migas tumbuh meningkat terutama ditopang kinerja ekspor Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Perbaikan ekspor di seluruh wilayah Indonesia

ini dipacu oleh harga komoditi ekspor nonmigas yang rata-rata meningkat sebesar 10,60 persen.

5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mencapai 5,17%, lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang hanya sebesar 5,07%. Dimana ini adalah capaian terbaik sejak tahun 2014 yang pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 5,01%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

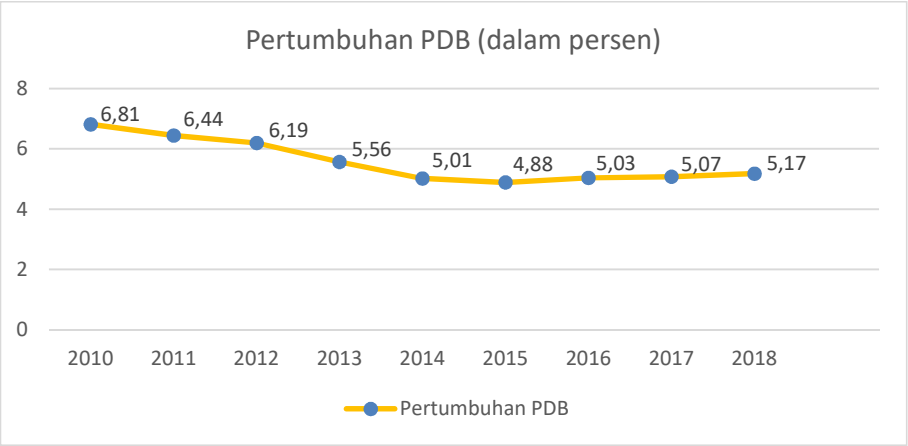

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2018)

Gambar 4.14.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2010 -2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 6,81%. Pada tahun tersebut, Bank Dunia melaporkan bahwa karena suburnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekitar 7 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelas menengah

pada tiap tahunnya. Akan tetapi setelah memuncak di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai melambat di tahun 2011 hingga tahun 2015. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi pada tahun-tahun tersebut, antara lain karena laju pertumbuhan ekonomi global mengalami pelemahan pada periode 2010-2014. Penyebab lainnya karena pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami penurunan permintaan dan adanya penurunan harga komoditas global, serta dikeluarkannya pembatasan ekspor mineral mentah.

Perekonomian Indonesia tahun 2016 mengalami sedikit perbaikan jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya, dari 4,88% pada tahun 2015 menjadi 5,03% di tahun 2016. Hal ini seiring dengan adanya kenaikan harga komoditas di pasar global. Ekonomi global perlahan menunjukkan tren positif, tentunya juga memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan aktivitas perdagangan internasional, dari sisi ekspor menerima dampak positif dari pemulihan ekonomi global.

Kemudian pada tahun 2017 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,07%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Pertumbuhan tahun 2017 dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,81%. Kemudian dari sisi pengeluaran tercatat bahwa pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa

sebesar 9,09%, ini merupakan hasil yang lebih baik dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut pada tahun 2018 ditopang permintaan domestik. Ekonomi nasional tumbuh 5,17% meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh 5,07%. Sejumlah 22 provinsi mampu tumbuh di atas nasional, terutama provinsi di Jawa, Sulawesi, dan Mapua. Dibandingkan tahun 2017, fase ekspansi perekonomian nasional didukung oleh akselerasi ekonomi di 18 provinsi, terutama di Jawa, Sumatera, dan Mapua. Permintaan domestik menjadi penopang utama ekonomi seluruh wilayah didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat karena program perluasan bantuan sosial, meningkatnya penyaluran dana desa, serta dukungan inflasi yang rendah dan stabil. Selain itu belanja penyelenggaraan Pilkada, persiapan pemilu 2019, serta berlanjutnya investasi swasta dan pemerintah juga menjadi penopang pertumbuhan permintaan domestik pada tahun 2018. Akan tetapi, kuatnya permintaan domestik juga berdampak pada peningkatan impor, baik untuk konsumsi, bahan baku, maupun barang modal, sehingga menjadi penahan pertumbuhan lebih tinggi di semua wilayah. Pertumbuhan ekspor secara nasional juga relatif tertahan, karena menurunnya kinerja ekspor Sumatera, Kalimantan, dan Bali Nusra. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

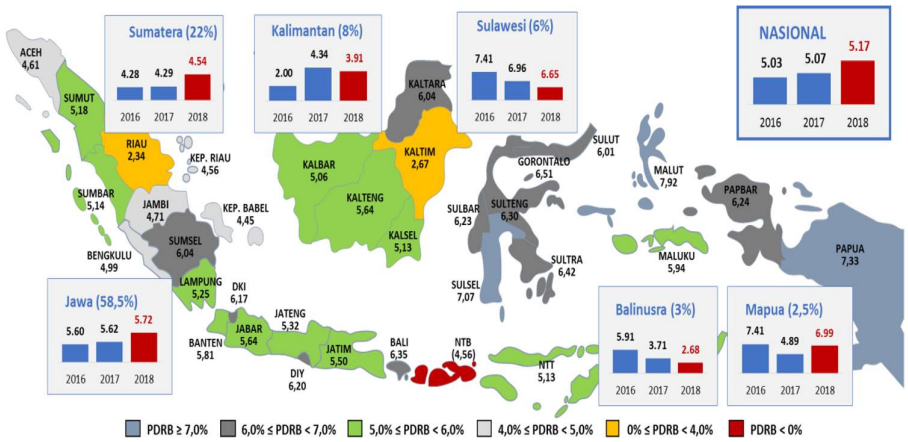

Sumber: Laporan Perekonomian Nusantara Bank Indonesia, (2018)

Gambar 4.15.
Peta pertumbuhan ekonomi Daerah tahun 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi tahun 2018 dicapai oleh Pulau Maluku dan Papua sebesar 6,99% berkontribusi 2,5% terhadap pertumbuhan nasional, disusul Sulawesi sebesar 6,65% berkontribusi 6% terhadap pertumbuhan nasional, berikutnya Pulau Jawa sebesar 5,72% berkontribusi 58,5% terhadap pertumbuhan nasional, Pulau Sumatera sebesar 4,54% berkontribusi 22% terhadap pertumbuhan nasional, Pulau Kalimantan sebesar 3,91% berkontribusi 8% terhadap pertumbuhan nasional dan yang terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68% berkontribusi 3% terhadap pertumbuhan nasional. Beberapa provinsi berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif di tahun 2018. Jika dilihat dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2014-2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Tahun 2014 – 2018 (juta) atas dasar Harga Konstan 2010

NO.	PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018
1	JAWA BARAT	1.149.216.057	1.207.232.342	1.275.619.241	1.343.864.432	1.419.689.116
2	BANTEN	349.351.228	368.377.203	387.835.089	410.045.924	433.884.318
3	D K I JAKARTA	1.373.389.129	1.454.563.847	1.539.916.881	1.635.366.581	1.736.195.620
4	D.I. YOGYAKARTA	79.536.082	83.474.452	87.685.810	92.302.022	98.026.564
5	JAWA TENGAH	764.959.151	806.765.092	849.099.355	893.750.437	941.283.278
6	JAWA TIMUR	1.262.684.495	1.331.376.099	1.405.563.511	1.482.299.577	1.563.756.369
7	BENGKULU	36.207.146	38.066.006	40.076.544	42.073.516	44.171.161
8	J A M B I	119.991.445	125.037.398	130.501.132	136.556.706	142.995.280
9	ACEH	113.490.359	112.665.532	116.374.300	121.240.979	126.824.491
10	SUMATERA UTARA	419.573.309	440.955.852	463.775.465	487.531.232	512.765.628
11	SUMATERA BARAT	133.340.836	140.719.474	148.134.244	155.976.492	163.995.268
12	R I A U	447.986.782	448.991.964	458.769.340	471.081.714	482.087.216
13	SUMATERA SELATAN	243.297.772	254.044.876	266.857.401	281.571.013	298.569.335
14	BANGKA BELITUNG	44.159.440	45.962.304	47.848.372	49.986.847	52.212.088
15	RIAU ISLANDS	146.325.235	155.131.351	162.853.039	166.111.356	173.689.134
16	LAMPUNG	189.797.491	199.536.917	209.793.728	220.625.566	232.214.280
17	KALIMANTAN SELATAN	106.779.398	110.863.117	115.743.573	121.855.756	128.106.382
18	KALIMANTAN BARAT	107.114.963	112.346.755	118.183.273	124.294.359	130.584.092
19	KALIMANTAN TIMUR	446.029.049	440.676.356	439.003.832	452.741.908	464.823.485
20	KALIMANTAN TENGAH	73.724.523	78.890.968	83.900.239	89.541.202	94.595.744
21	KALIMANTAN UTARA	47.696.350	49.315.750	51.064.740	54.534.510	57.825.840
22	SULAWESI TENGAH	71.677.531	82.787.202	91.014.565	97.474.859	103.617.686
23	SULAWESI SELATAN	233.988.051	250.802.993	269.401.313	288.814.171	309.243.628
24	SULAWESI UTARA	66.360.757	70.425.330	74.764.660	79.485.474	84.258.691
25	GORONTALO	20.775.803	22.068.803	23.507.209	25.090.345	26.722.593
26	SULAWESI BARAT	24.195.655	25.964.432	27.524.767	29.347.194	31.176.590
27	SULAWESI TENGGARA	68.291.785	72.993.328	77.745.512	83.001.823	88.328.518
28	NUSA TENGGARA BARAT	73.372.964	89.337.986	94.524.290	94.639.544	90.323.420
29	B A L I	121.787.575	129.126.562	137.296.445	144.944.692	154.150.979
30	NUSA TENGGARA TIMUR	54.107.974	56.770.793	59.678.012	62.724.720	65.941.414
31	M A L U K U	23.567.734	24.859.197	26.284.228	27.813.962	29.465.362
32	PAPUA	121.391.234	130.311.605	142.224.931	148.822.516	159.728.926
33	MALUKU UTARA	19.208.761	20.380.304	21.556.680	23.210.865	25.050.118
34	PAPUA BARAT	50.259.908	52.346.486	54.711.282	56.902.622	60.453.560
TOTAL		**8.603.635.969**	**9.033.168.675**	**9.498.833.004**	**9.995.624.914**	**10.526.756.175**

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp. 1.736,19 triliun, kedua Jawa Timur sebesar Rp. 1.563,75 triliun dan ketiga adalah Jawa Barat sebesar Rp. 1.419,68 triliun. Ini menunjukkan bahwa Perekonomian nasional tumbuh meningkat terutama ditopang kinerja perekonomian Jawa, Sumatera, dan Mapua, perbaikan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia telah mendorong kinerja ekonomi nasional menguat di tahun 2018.

C. Analisis Data

Data penelitian ini diolah dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.2.8. Terdapat beberapa langkah di dalam menyelesaikan model persamaan strukutral (SEM) dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.2.8. Beberapa langkah tersebut yaitu analisis *outer model*, *inner model* dan pengujian hipotesis.

1. Evaluasi Model Pengukuran atau *Outer Model*

Outer Model atau sering juga disebut (*outer relation* atau *measurement model*) menjelaskan spesifikasi hubungan antara variabel yang diteliti dengan indikatornya. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas untuk model yang seluruhnya mengunakan indikator reflektif. Keempat evaluasi model pengukuran atau Outer Model berikut ini didapat dengan menjalankan PLS Algorithm dalam SmartPLS v.3.2.8.

a. Reliabilitas Indikator

Reliabiltas indikator bertujuan untuk menilai apakah indikator pengukuran variabel laten reliabel atau tidak. Caranya dengan mengevaluasi hasil *outer loading* tiap indikator. Nilai *loading* di atas 0,7 menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Hasil *output calculate alghoritm* dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.2.9 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

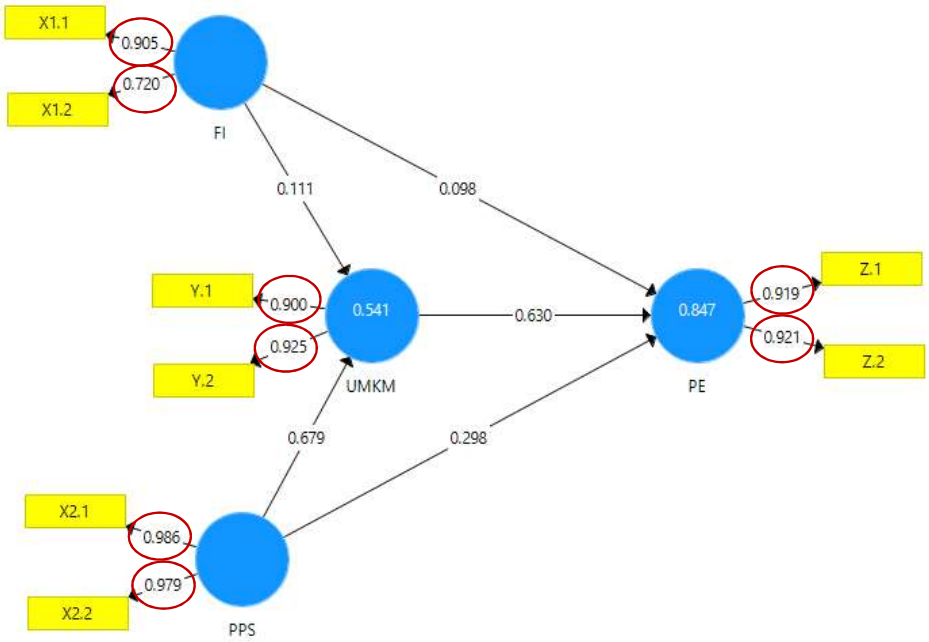

Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 4.16.
Hasil *Output Calculate Alghoritm*

Dari Gambar 4.12. Hasil *Output Calculate Alghoritm* diketahui bahwa nilai indikator X1.1 sebesar 0,905, X1.2 sebesar 0,720, X2.1 sebesar 0,986, X2.2 sebesar 0,979, Y.1 sebesar 0,900, Y.2 sebesar 0,925, Z.1 sebesar 0,919,

dan Z.2 sebesar 0,921. Seluruh indikator tidak terdapat nilai di bawah 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator memenuhi reliabilitas yang baik. Hasil *loading factor* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8. Hasil *Outer Loading*

Indikator	X1 (FI)	X2 (PPS)	Y (UMKM)	Z (PE)
X1.1	0,905			
X1.2	0,720			
X2.1		0,986		
X2.2		0,979		
Y.1			0,900	
Y.2			0,925	
Z.1				0,919
Z.2				0,921

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 4.7. seluruh indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *loading* lebih dari 0,70 dan dapat dinyatakan bahwa indikator tersebut reliabel. ini juga menunjukkan bahwa indikator variabel memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

b. *Internal Consistency Reliability*

Untuk mengevaluasi *internal consistency reliability* terdapat dua alat ukur yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha.* Dalam pengukuran tersebut apabila nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang dicapai adalah > 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Adapun hasil nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
FI	0,800	0,706
PPS	0,982	0,964
UMKM	0,909	0,800
PE	0,917	0,818

Sumber: Data sekunder diolah

Pada Tabel 4.8 Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* terlihat bahwa nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk semua variabel sudah di atas 0,70. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua konstruk model yang diestimasi reliabel, karena telah memenuhi kriteria. Jika digambarkan menjadi sebuah grafik nilai *composite reliability* dapat dilihat pada gambar berikut.

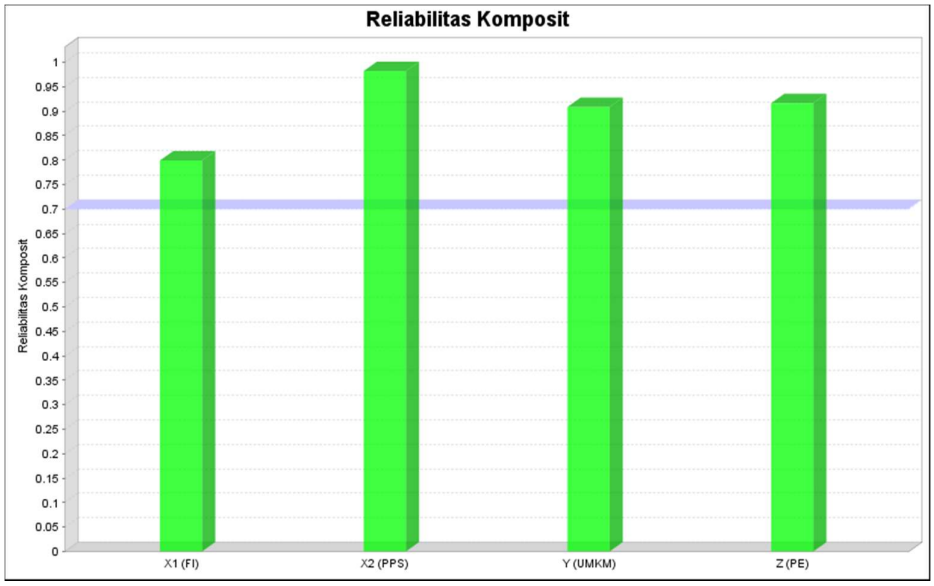

Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 4.17.
Grafik Nilai Reliabilitas Komposit

Dapat dilihat pada gambar 4.17. bahwa Nilai *composite reliability* terkecil terdapat pada variabel *Financial Inclusion* (FI) yaitu 0,800. Sedangkan nilai tertinggi terdapat pada variabel Pembiayaan Perbankan Syariah (PPS) yaitu 0,982.

c. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen sebuah konstruk dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *Average Variance Extracted (AVE).* Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya. hasil pengolahan data dengan SmartPLS menunjukkan hasil Gambar sebagai berikut.

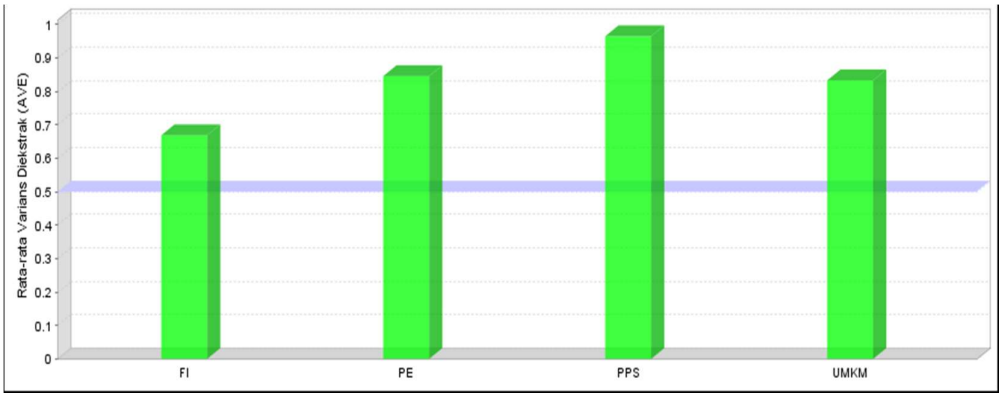

Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 4.18.
Rata-rata Varians Diekstrak

Berdasarkan Gambar 4.18, menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan nilai AVE yang lebih besar dari 0,50, artinya bahwa masing-masing variabel telah memenuhi persyaratan yang baik.

d. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan (*discriminant validity*) berfungsi untuk menguji bahwa alat ukur, secara tepat mengukur konstruk yang diukur, bukan konstruk yang lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainya. Dalam aplikasi SmartPLS 3.2.8. Uji validitas diskriminan menggunakan nilai *cross loadings*, dan *Fornell-Larkcer Criterion*.

1) *Cross Loadings*

Nilai *cross loading* masing-masing konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada konstruk lainnya. Nilai *cross loading* yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7. Adapun nilai *cross loading* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10. Nilai *Cross Loading* antar Indikator Variabel

Indikator	FI	PPS	UMKM	PE
X1.1	0,905	0,440	0,404	0,481
X1.2	0,720	0,257	0,249	0,294
X2.1	0,456	0,986	0,792	0,837
X2.2	0,413	0,979	0,624	0,726
Y.1	0,301	0,636	0,900	0,743
Y.2	0,444	0,691	0,925	0,870
Z.1	0,413	0,833	0,771	0,919
Z.2	0,490	0,641	0,862	0,921

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 4.10. dapat dilihat bahwa nilai *Cross Loading* masing–masing indikator variabel lebih besar daripada nilai korelasi seluruh indikator variabel lainnya. Dapat dikatakan bahwa masing-masing

variabel dan indikator variabel memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

2) *Fornell-Larkcer*

Menurut Henseler dkk., metode lain untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan *Fornell-Larcker Criterion*, sebuah metode yang membandingkan nilai akar kuadrat dari *Average Variance Extracted (AVE*) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Menurut Wong, jika nilai akar kuadrat *AVE* setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka model tersebut dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik. Adapun nilai *Fornell-Larcker Criterion* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11. Nilai *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	X1 (FI)	X2 (PPS)	Y (UMKM)	Z (PE)
X1 (FI)	0,818			
X2 (PPS)	0,444	0,982		
Y (UMKM)	0,413	0,728	0,913	
Z (PE)	0,491	0,801	0,888	0,920

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 4.11. dapat dilihat bahwa nilai korelasi masing – masing variabel lebih besar daripada nilai korelasi seluruh variabel lainnya. Korelasi FI sebesar 0,818 lebih besar dari pada korelasi FI dengan PPS (0,444), FI dengan UMKM (0,413), FI dengan PE (0,491). Korelasi PPS sebesar 0,982 lebih besar dari pada korelasi PPS dengan UMKM (0,728), PPS dengan PE (0,801). Korelasi UMKM sebesar 0,913 lebih

besar dari pada korelasi UMKM dengan PE (0,888) dan Korelasi PE sebesar 0,920.

2. Evaluasi Model Struktural atau *Inner Model*

Pengujian *Inner Model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan *R-square* untuk konstruk dependen. Pengujian *inner model* dapat dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Cross-validated Redudancy (Q^2)* untuk *predictive relevance*, dan *path coefficients* atau koefisien jalur.

a. *R Square*

Penilaian model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai *R-Square* dari hasil analisis menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12. Nilai *R-Square*

Variabel	*R Square*	*Adjusted R Square*
Y (UMKM)	0,541	0,533
Z (PE)	0,847	0,843

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4.12. nilai *R-Square* menunjukkan bahwa:

1) Nilai *R-Square* dapat disimpulkan bahwa konstruk UMKM (Perkembangan UMKM) memiliki *R Square* sebesar 0,541 yang berarti bahwa variansi pada konstruk Peningkatan UMKM dapat dijelaskan oleh konstruk *Financial Inclusion* (FI), dan Pembiayaan Perbankan Syariah

(PPS) sebesar 54,1 %. Sementara 45,9 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2) Konstruk PE (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki *R Square* sebesar 0.847 yang berarti bahwa variansi pada konstruk Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh perkembangan UMKM (UMKM), *Financial Inclusion* (FI), dan Pembiayaan Perbankan Syariah (PPS) sebesar 84,7 %. Sementara 15,3 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

b. *Cross-Validated Redudancy (Q^2)*

Cross-validated Redudancy (Q^2) atau *Q-square* untuk menilai prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. Jika Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance* yang akurat terhadap konstruk tertentu. Namun bila nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang mempunyai *predictive relevance*. Dari hasil uji dengan menggunakan smartPLS 3.2.8. didapatkan hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13. Nilai *Cross-validated Redudancy (Q^2)*

VARIABEL	SSO	SSE	Q^2 (=1-SSE/SSO)
X1 (FI)	264,000	264,000	
X2 (PPS)	264,000	264,000	
Y (UMKM)	264,000	150,863	0,429
Z (PE)	264,000	86,076	0,674

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4.13. untuk nilai *Cross-validated Redudancy (Q^2)* variabel Y (UMKM) sebesar 0,429, ini menunjukkan bahwa variabel

tersebut mempunyai *predictive relevance* yang akurat terhadap konstruk tertentu. Artinya variabel Y (UMKM) dalam model merupakan variabel laten yang memiliki relevensi prediksi yang baik sebesar 42,9%.

Nilai *Cross-validated Redudancy* (Q^2) variabel Z (PE) sebesar 0,674, menunjukkan bahwa variabel Z juga mempunyai *predictive relevance* yang akurat terhadap konstruk. Artinya variabel Z (PE) dalam model merupakan variabel laten yang memiliki relevensi prediksi yang baik sebesar 67,4%.

c. *Path Coefficients* (Koefisien Jalur)

Selanjutnya dilakukan pengukuran *path coefficients* antar konstruk untuk melihat signifikansi dan kekuatan hubungan tersebut dan juga untuk menguji hipotesis. Nilai *path coefficients* berkisar antara -1 hingga +1. Semakin mendekati nilai +1, hubungan kedua konstruk semakin kuat. Hubungan yang makin mendekati -1 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat negatif. Adapun nilai *path coefficients* dapat disajikan pada gambar grafik berikut.

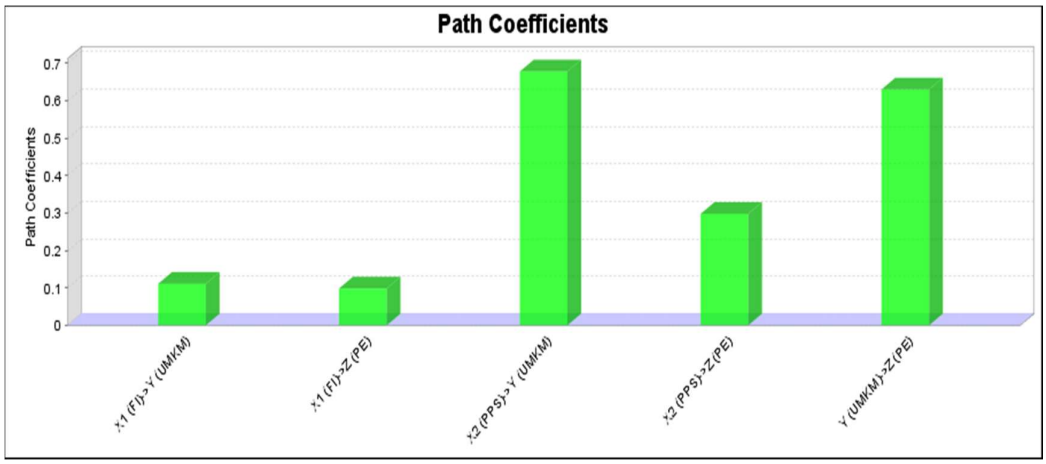

Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 4.19.
Grafik *Path Coefficients*

Dari gambar 4.19. hasil nilai *path coefficients* menunjukkan bahwa variabel X1 (FI) dengan variabel Y (UMKM) menghasilkan nilai sebesar 0,111, ini berarti bahwa hubungan antara *financial inclusion* dengan peningkatan UMKM memiliki hubungan yang positif. Variabel X1 (FI) dengan variabel Z (PE) menghasilkan nilai sebesar 0,098, berarti bahwa hubungan antara *financial inclusion* dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Variabel X2 (PPS) dengan variabel Y (UMKM) menghasilkan nilai sebesar 0,679, berarti bahwa hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dengan peningkatan UMKM memiliki hubungan positif dan kuat. Variabel X2 (PPS) dengan variabel Z (PE) menghasilkan nilai sebesar 0,298, berarti bahwa hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif. Dan variabel Y (UMKM) dengan variabel Z (PE) menghasilkan nilai sebesar 0,630, berarti bahwa hubungan antara

perkembangan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan kuat.

3. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesa menggunakan SmartPLS 3.2.8., dilakukan dengan Prosedur *bootstrapping* akan menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai t-tabel. Penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan (a) = 5% = 0,05, nilai nilai t-tabelnya adalah 1,96. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1.96), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 1.96), maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Sebelum membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu mencari nilai *degrees of freedom* (*df*) sebagai dasar penentuan/pencarian nilai t-tabel. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai *degrees of freedom* adalah df = N – k, yang berarti 132 (jumlah sampel) dkurangi 4 (jumlah variabel) sama dengan 128. Pada pengujian hipotesis, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 95% ($\alpha = 0.05$ atau 5%). Untuk t-tabel dengan tingkat signifikasi 95% dan df 128 didapatkan nilai t-tabel sebesar 1,978. Maka t-statistik (t) yang bernilai lebih besar dari t-tabel dengan df 128 akan dianggap valid atau diterima.

Adapun nilai t-statistik dalam *path coefficients* yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan *bootstrapping* pada software SmartPLS versi 3.2.8. disajikan pada gambar dan tabel berikut.

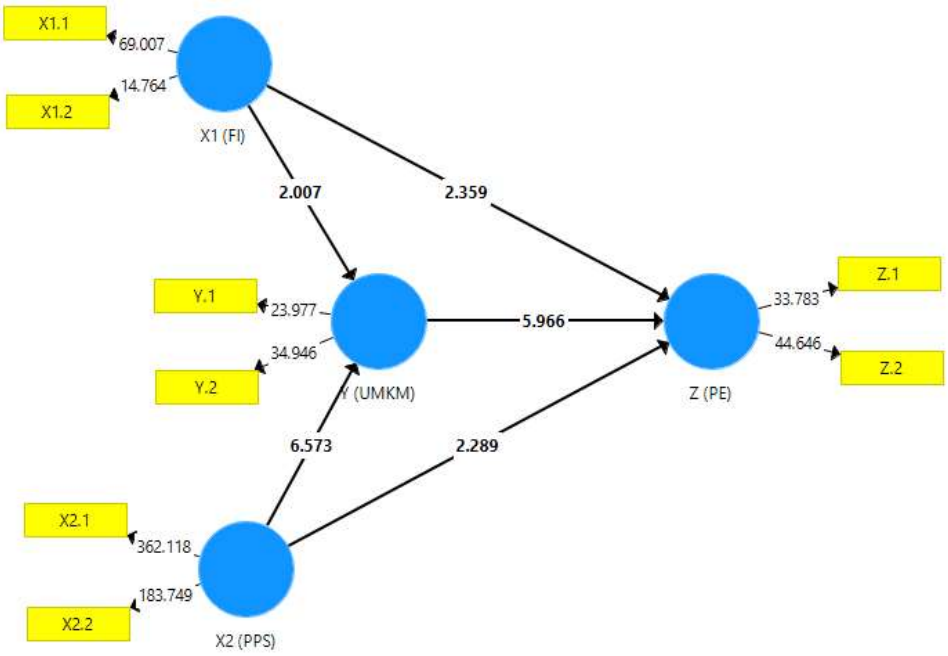

Gambar 4.20.
Output *Path Coefficients* (*bootstrapping*)

Tabel 4.14 Nilai *Path Coefficients* (*bootstrapping*)

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (|O/STDEV|)	P Values
X1 (FI) -> Y (UMKM)	0,111	0,116	0,056	2,007	**0,036**
X2 (PPS) -> Y (UMKM)	0,679	0,681	0,103	6,573	**0,000**
X1 (FI) -> Z (PE)	0,098	0,097	0,042	2,359	**0,008**
X2 (PPS) -> Z (PE)	0,298	0,278	0,130	2,289	**0,041**
Y (UMKM) -> Z (PE)	0,630	0,651	0,106	5,966	**0,000**

Sumber: Data sekunder diolah

Dari gambar 4.20. dan tabel 4.14. Nilai uji *Path Coefficients* (*bootstrapping*), maka hasil korelasi dan hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Hipotesis pertama (H_1)** adalah **X1 (FI) -> Y (UMKM)**, didapatkan nilai *t-values* untuk variabel *financial inclusion* (FI) terhadap perkembangan UMKM (UMKM) sebesar 2,007. Nilai *t-values* tersebut lebih besar dari pada nilai *t-tables* pada tingkat signifikansi 95 % yaitu sebesar 1,978. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif pada variabel *financial inclusion* (FI) terhadap perkembangan UMKM (UMKM). Maka hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima. Pada koefisien jalur hipotesis 1 bernilai 0,111 membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif antara *financial inclusion* (FI) terhadap perkembangan UMKM (UMKM).
2) **Hipotesis kedua (H_2)** adalah **X2 (PPS) -> Y (UMKM)**, didapatkan nilai *t-values* untuk variabel pembiayaan perbankan syariah (PPS) terhadap perkembangan UMKM (UMKM) sebesar 6,537. Nilai *t-values* tersebut lebih besar dari pada nilai *t-tables* pada tingkat signifikansi 95 % yaitu sebesar 1,978. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan pada variabel pembiayaan perbankan syariah (PPS) terhadap perkembangan UMKM (UMKM). Maka hipotesis kedua (H_2) dinyatakan diterima. Pada koefisien jalur hipotesis 2 bernilai 0,679 membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif signifikan antara

pembiayaan perbankan syariah (PPS) terhadap perkembangan UMKM (UMKM).

3) **Hipotesis ketiga (H_3)** adalah **X1 (FI) -> Z (PE)**, didapatkan nilai *t-values* untuk variabel *financial inclusion* (FI) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 2,359. Nilai *t-values* tersebut lebih besar dari pada nilai *t-tables* pada tingkat signifikansi 95 % yaitu sebesar 1,978. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif pada variabel *financial inclusion* (FI) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE). Maka hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima. Pada koefisien jalur hipotesis 3 bernilai 0,098 membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif antara *financial inclusion* (FI) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE).
4) **Hipotesis keempat (H_4)** adalah **X2 (PPS) -> Z (PE)**, didapatkan nilai *t-values* untuk variabel pembiayaan perbankan syariah (PPS) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 2,289. Nilai *t-values* tersebut lebih besar dari pada nilai *t-tables* pada tingkat signifikansi 95 % yaitu sebesar 1,978. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan pada variabel pembiayaan perbankan syariah (PPS) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) Maka hipotesis keempat (H_4) dinyatakan diterima. Pada koefisien jalur hipotesis 4 bernilai 0,298 membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif signifikan antara pembiayaan perbankan syariah (PPS) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE).
5) **Hipotesis kelima (H_5)** adalah **Y (UMKM) -> Z (PE)**, didapatkan nilai *t-values* untuk variabel perkembangan UMKM (UMKM) terhadap

pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 5,966. Nilai *t-values* tersebut lebih besar dari pada nilai *t-tables* pada tingkat signifikansi 95 % yaitu sebesar 1,978. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan pada variabel perkembangan UMKM (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) Maka hipotesis kelima (H_5) dinyatakan diterima. Pada koefisien jalur hipotesis 5 bernilai 0,630 membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif signifikan antara perkembangan UMKM (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE).